

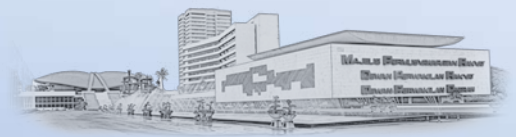


BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 786/IX/2013

I/SEPTEMBER 2013



Monitoring Rekening Kementerian Belum Optimal



KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA SEPTEMBER 2013

Minggu Pertama bulan September ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 03 September dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012.

Rapat Paripurna 03 September 2013

Sebelum memulai acara Rapat Paripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, Ketua Rapat Mohamad Sohibul Iman PhD memberitakan bahwa telah dilakukan pengambilan sumpah anggota DPR Antar Waktu oleh Ketua DPR pada tanggal 27 dan 29 Agustus 2013 atas nama;

1. Saudara Marcus Silanno, S.IP, anggota No.509 dari Partai Demokrat menggantikan Saudara H.Suhartono Wijaya, S.E, M.B.A.
2. Saudara Drs.H.Anwar Sanusi S.H, S.Pel, MM anggota No.297 dari Partai Persatuan Pembangunan menggantikan Saudara Drs. H. Endang Sukandar, M.Si.

Dalam agenda pembicaraan Tingkat II atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, didahului dengan penyampaian laporan Badan Anggaran yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan Tingkat I; dilanjutkan dengan persetujuan atau penolakan dari fraksi-fraksi yang disampaikan secara lisan; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili.

Laporan Badan Anggaran DPR RI disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar, Dr. Yasonna H. Laoly, S.H, MSc, intisari laporan sebagai berikut:

1. Pelaporan pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi-fraksi dalam rapat kerja di Banggar DPR RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 yang terdiri dari;
 - a. Fraksi Partai Demokrat terkait dengan pendapatan negara,

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



meminta kepada Pemerintah untuk terus melanjutkan program reformasi dibidang perpajakan, yang mencakup program reformasi di bidang administrasi, di bidang perundang-undangan, pengawasan dan penggalian potensi serta meminta kepada Pemerintah untuk terus memperbaiki tingkat realisasi pencairan dana, perbaikan prosedur pengadaan barang dan jasa dan penyederhanaan dokumen pencairan yang selama ini terus menjadi kendala.

- b. Fraksi Partai Golkar berharap agar pengelolaan keuangan negara ke depan dapat lebih ditingkatkan kualitasnya, agar amanah konstitusi dapat dipenuhi. Ujung dari pengelolaan keuangan negara adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan, yang merupakan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Fraksi PDIP berpendapat perlunya ada konsep yang jelas tentang reward and punishment sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara; kinerja pelaksanaan anggaran harus selaras dengan amanat konstitusi disertai indikator penggunaan anggaran yang memenuhi prinsip tertib, taat peraturan perundang-undangan, ekonomis dan efisien. Serta, mendesak Pemerintah untuk lebih meningkatkan upaya penciptaan tertib dan disiplin anggaran mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawaban.

- d. Fraksi PKS menyatakan perlu ada konsep baru atas *performance based budgeting* yang dapat menyentuh tingkat *outcome*, tidak sebatas pada output semata. Mendesak Pemerintah supaya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama K/L yang masih mendapat opini



- audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- e. Fraksi PAN melihat bahwa Pemerintah perlu segera membenahi dan melakukan sosialisasi K/L terkait SAP tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial dan meningkatkan peranan aparat pengawas internal Pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial.
 - f. Fraksi PPP menyoroti pentingnya fungsi perencanaan anggaran karena diharapkan dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
 - g. Fraksi PKB meminta Pemerintah terus melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan pada masyarakat.
 - h. Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah guna mewujudkan postur APBN yang ideal di tahun berikutnya, maka secara bertahap perlu dilakukan upaya untuk mengurangi belanja rutin dan selanjutnya dialihkan ke dana infrastruktur, pendidikan, pertanian dan kesehatan. Serta, meninjau kembali kebijakan defisit mengingat hampir selalu diiringi dengan pengambilan utang baru.
 - i. Fraksi Partai Hanura berpandangan bahwa Pemerintah kurang serius dalam menanggapi dan menindaklanjuti hasil temuan BPK, tercermin dari berulangnya beberapa kasus yang terjadi di tahun sebelumnya terulang di tahun 2012.
2. Bahwa permasalahan yang ditemukan BPK dalam LKPP 2012 sebanyak 17 terdiri dari kelemahan sistem pengendalian intern 12 masalah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan lima masalah. Namun, penyebab utamanya yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP 2012 adalah; permasalahan terkait anggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial; kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja lainnya; belum menelusuri keberadaan aset Eks BPPN; catatan dan fisik SAL masih berbeda.
 3. Sehubungan dengan temuan BPK tersebut, fraksi-fraksi DPR meminta Pemerintah menindaklanjutinya dengan berbagai langkah.
 4. Sehubungan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, maka Badan Anggaran minta dimasukkan rekomendasi dalam penjelasan umum, antara lain;
 - a. Agar Pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan pada ABPN TA 2013, terutama terhadap Kementerian/Lembaga yang masih mendapat opini audit; “Tidak Menyatakan Pendapat” dan “Wajar Dengan Pengecualian”.
 - b. Pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2012 yang terdiri dari 12 temuan sistem pengendalian intern dan 5 temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Pemerintah segera menyelesaikan dokumen sumber aset Eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan.
 - d. Khusus bagi Kementerian Negara/Lembaga yang hanya dapat merealisasikan belanja barang dan belanja modal kurang dari 85 persen dari Pagu Anggaran, supaya Pemerintah melaporkan pada Banggar dan Komisi terkait DPR RI.
- Setelah laporan Banggar, maka fraksi-fraksi telah memberikan persetujuan atas RUU tadi untuk disahkan menjadi UU. RUU ini terdiri dari 11 pasal, berikut penjelasannya;
- Dalam penjelasan umum dari RUU ini dikatakan bahwa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan. Sehingga, laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu RUU, untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP tahun 2012 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.
- Pendapat akhir Pemerintah atas persetujuan RUU ini antara lain sebagai berikut;
- Bahwa dalam pembahasan RUU telah terjadi interaksi dan dinamika yang baik, termasuk menghasilkan saran/rekomendasi kepada Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada tahun-tahun berikutnya. Saran/rekomendasi tersebut akan menjadi dorongan yang positif untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi DPR, Pemerintah akan melakukan berbagai langkah antara lain; peningkatan kualitas laporan keuangan terutama Kementerian Negara/Lembaga yang masih mendapat opini audit “Tidak Menyatakan Pendapat” dan “Wajar Dengan Pengecualian”. Langkah ini dilakukan antara lain melalui pembinaan secara intensif kepada K/L terkait.
- Pemerintah akan menyelesaikan temuan-temuan audit antara lain; menyusun rencana tindak lanjut yang tepat dan terukur; melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana tindak lanjut dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
- Dalam rapat pembahasan, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 telah dicapai kesepakatan untuk menambahkan beberapa substansi termasuk penambahan ketentuan tentang pemberian penghargaan dan sanksi dalam bentuk penambahan atau pengurangan anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya terkait dengan penilaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Penambahan substansi ini akan semakin mendorong semua K/L untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. ***



Anggota Banggar Reni Marlinawati berjabat tangan dengan Menkeu Chatib Basri.

Monitoring Rekening Kementerian Belum Optimal

Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai pemerintah belum optimal melakukan monitoring atas rekening kementerian dan lembaga. Sehingga, masih banyak anggaran yang mengendap atau salah sasaran.

Demikian mengemuka dalam rapat kerja Banggar dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, Senin (2/9). “Kemenkeu selaku bendahara umum negara belum optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola kementerian dan lembaga,” kata Djoko Udjiyanto Wakil Ketua Banggar saat membacakan permasalahan yang ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012.

Selain belum optimalnya monitoring atas rekening kementerian/lembaga, Banggar juga mengungkapkan, anggaran untuk belanja bantuan sosial banyak yang tidak sesuai ketentuan. Djoko mengungkapkan, “Adanya pengendapan bantuan sosial dan adanya penyaluran belanja bantuan sosial yang tidak sesuai dengan sasaran.”

Sistem belanja akhir tahun juga dinilai tidak berjalan se-

cara efektif. Satu hal lagi yang menjadi sorotan Banggar adalah pemerintah selama ini belum menelusuri sepenuhnya keberadaan aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Penilaian terhadap berbagai aset eks BPPN belum diselesaikan pemerintah.

Seperti diketahui, aset bank-bank yang dilikuidasi menjelang reformasi 1998 sangat besar. Hingga kini belum jelas benar semua aset tersebut. Semua sorotan ini merupakan beberapa bagian dari kelemahan sistem pengendalian intern, permasalahan LKPP 2012. Bahkan, dalam laporan Banggar ini, ada masalah kelemahan lainnya, yaitu kebijakan dan metode penghitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan belanja. (mh), foto rizka/parle/hr.

Firman Subagyo: Ketahanan Pangan Menjadi Prioritas Utama



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo menegaskan penting dan strategisnya terhadap ketahanan pangan sehingga pangan menjadi prioritas utama. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp.1.600 Triliun lebih, artinya kalau Pemerintah atau negara serius untuk memprioritaskan terhadap swasembada pangan tentunya APBN tersebut bisa dialokasikan untuk swasembada pangan,” katanya.

Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, yang mengagendakan pembahasan RKA-K/L Kementerian Tahun 2014 dan Usulan Program-program Tahun Anggaran 2014, di Gedung Nusantara DPR, Kamis (5/9).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan terkait Pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya. Dalam kesem-

patan itu disampaikan ada 5 poin penting yaitu diantaranya diharapkan semua kementerian melakukan suatu penghematan terhadap kegiatan yang kurang produktif perlu dilakukan evaluasi program yang gagal dan bermasalah. Selain itu, menyempurnakan kebijakan subsidi diantaranya dengan mengubah secara bertahap sistem subsidi dari subsidi harga menjadi yang lebih tepat.

“Oleh karena itu hendaknya dalam pembahasan anggaran Tahun 2014 mengacu kepada poin-poin yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan tersebut,” kata Firman.

Terkait Swasembada Pangan, Firman Subagyo menerangkan bahwa dalam rencana strategi yang disampaikan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan, yaitu untuk tiga komoditi yaitu Jagung, Kedelai, dan Padi. Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 30,4 Triliun, Tahun 2013 Rp 36,1 Triliun dan Tahun 2014 sebesar Rp 30,1 Triliun,

sehingga totalnya Rp 96,7 Triliun.

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Pertanian yang belakangan ini mengalami penurunan, otomatis produksi pangan juga akan menurun. Artinya bahwa capaian swasembada pangan mustahil untuk dicapai. “Persoalannya adalah apakah Kementerian Pertanian pernah membuat perencanaan?” ungkapny.

Terkait anggaran Kementerian Pertanian yang selalu berkurang, Firman menjelaskan sudah diambil kebijakan 2008-2010 ada PSO yang dipayung dengan UU APBN, Tahun 2011 PSO dengan payung hukum Perpres, dan kemudian Tahun 2012 pengadaan yang dilakukan secara tender, namun semuanya ini gagal karena tidak adanya serapan yang tinggi.

Tentang evaluasi masalah subsidi, menurut Firman menjadi perhatian serius. Dia menerangkan bahwa Tahun 2013 Komisi IV telah menyetujui subsidi benih dalam APBN 2013, namun sampai hari ini pelaksanaannya sangat minim. “Kenapa sampai terjadi tidak terserapnya dari APBN ini?,” tanyanya.

Lebih lanjut, terkait subsidi pupuk ia berpendapat subsidi pupuk urea masih patut diberikan anggaran yang begitu besar, karena faktanya lahan-lahan yang produktif tingkat kesuburannya sudah berkurang akibat penggunaan pupuk urea yang berlebihan.

Disisi lain subsidi pupuk urea banyak penyimpangan, yang nyaris temuan di lapangan sampai hari ini tidak ada satu pun yang diproses hukum. “Belum ada oknum yang melakukan tindak pidana terhadap penyalahgunaan terhadap pupuk subsidi masuk penjara atau disidang dalam pengadilan,” ungkap Firman Subagyo. (as) foto:wahyu/parle.

Komisi I Menerima Delegasi Koalisi Nasional Oposisi Mesir

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Delegasi Nasional Oposisi Mesir, untuk mendapat imbalan informasi dan mengetahui yang akan dilakukan oleh kelompok oposisi yang dipimpin oleh muslim brotherhood.

Penting bagi Komisi I mendengar dua pihak, sebelumnya juga ada kunjungan duta besar Mesir dan salah satu wakil dari Pemerintah Militer yang dikirim, untuk menjelaskan versinya. “Penting bagi kita juga mendengarkan dari kelompok oposisi, yang hadir ini salah satu juru bicara dari koalisi nasional oposisi di Mesir,” kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, usai menerima Delegasi Nasional Oposisi Mesir Ahmad Fahmi, di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (5/09).

Mahfudz, menjelaskan dalam pertemuan tersebut delegasi oposisi menerangkan mereka akan terus melakukan demonstrasi secara damai dan mereka terbuka pada ide dialog, tetapi dengan sejumlah syarat-syarat yang menurutnya sangat wajar.

“Tidak adanya tahanan politik, dalam kerangka *democratic tranformation*, saya kira ini yang menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk mendorong dan



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menerima kunjungan Delegasi Nasional Oposisi Mesir Ahmad Fahmi.

membantu proses resolusi konflik dan proses rekonsiliasi melalui jalan dialog,” jelasnya.

Artinya, kata Mahfudz Siddiq, Indonesia harus mengambil peran dan langkah yang lebih kongkrit. Berdasarkan pengalaman transisi demokrasi Indonesia dan pengalaman resolusi konflik yang kita miliki.

Lebih lanjut dikatakan dari kelompok koalisi nasional oposisi terbuka pada dialog, ada niat baik untuk melakukan penyelesaian secara damai, tetapi juga dijelaskan bahwa dari pihak Militer Mesir sekarang ini belum mau membuka

diri untuk itu, dan terus melakukan tindakan-tindakan represif.

Menurut Mahfudz dibutuhkan tekanan yang lebih kuat dari berbagai pihak termasuk Internasional, hingga bisa memaksa Rezim Militer Mesir sekarang untuk mau menyelesaikan ini secara damai dan dialog. “Yang terjadi di Mesir menurut saya sudah merupakan tragedi kemanusiaan, dengan korban yang tewas, terluka dan penangkapan yang terus berlangsung. Ini harus segera dihentikan,” tegas Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera.

(as) foto: rizka/parle.

DPR Usulkan Pertukaran Mahasiswa dengan Ukraina

Indonesia direncanakan akan melakukan pertukaran lima mahasiswa dengan Ukraina untuk memperdalam *Political Science* dan bidang teknologi.

Hal tersebut menjadi salah satu isi pertemuan antara Wakil ketua DPR RI Bidang Korinbang (Koordinator industri dan pembangunan), Pramono Anung Wibowo dengan Duta Besar Ukraina, Volodymyr Pakhil yang berlangsung di ruang tamu Wakil Ketua DPR RI, Senayan Jakarta pada Kamis (5/9).

“Ukraina sebagai salah satu negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Dan dahulu saat jaman Bung Karno banyak orang-orang kita (Indonesia) yang dikirim ke Uni Soviet, salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Uni



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo menerima Duta Besar Ukraina, Volodymyr Pakhil.

Soviet itu sekarang berada di Ukraina dan menjadi universitas unggulan di dunia yang sangat unggul dalam bidang Metaloginya. Sehingga tidak ada salahnya kalau kita belajar juga dari Ukraina, negara yang memiliki perkembangan teknologi yang cukup maju,” jelas Pramono.

Ditambahkan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, bahwa Ukraina mengusulkan lima mahasiswa yang akan menjalani pertukaran tersebut, namun tidak tertutup kemungkinan pada kenyataannya jumlahnya akan bertambah.

Selain itu menurut Pramono, pihaknya menyepakati membentuk bilateral group dengan parlemen Ukraina. Di-harapkan hubungan tersebut tidak hanya sekedar hubungan diplomasi yang sifatnya formal, tapi juga hubungan bisnis untuk kedua negara.

Ia menilai, Ukraina sebagai salah satu negara di Eropa yang pertumbuhan ekonominya belakangan sangat baik. Sehingga sangat wajar jika Indonesia bisa menjalin kerjasama jangka panjang dengan negara tersebut. (Ayu) foto: iw/parle.

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2014

Komisi XI dan Pemerintah akhirnya menyepakati sejumlah asumsi makro di RAPBN 2014. Asumsi ini sedikit berbeda dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2014 beserta Nota Keuangannya, pada 16 Agustus lalu.

Sejumlah asumsi yang disepakati diantaranya; untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditetapkan sebesar 6,0 persen dan tingkat inflasi 5,5 persen. Sementara itu, suku bunga relatif disepakati sebesar 5,5 persen, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.500 per dolar AS. Asumsi nilai tukar ini lebih lemah dibandingkan usulan sebelumnya, yakni Rp 9.750.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI Oly Dondokambey



Ketua Komisi XI DPR Oly Dondokambey.

ini, hadir dari perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Keuangan M Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin. Raker berlangsung di ruang rapat Komisi XI, Gedung

Nusantara I, Kamis (29/8) malam.

Sebelum mencapai kesepakatan tersebut beberapa fraksi memberikan koreksi dan usulan terkait perubahan asumsi. Fraksi Golkar mengusulkan perubahan asumsi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yaitu sebesar Rp10.500. Sedangkan, Fraksi PKS mengusulkan perubahan pada asumsi nilai tukar sebesar Rp 10.000 dan pertumbuhan ekonomi 6,1 persen.

Fraksi PAN memberikan usulan perubahan pada asumsi nilai tukar rupiah di posisi Rp 9.800. Sementara itu, Fraksi Demokrat mengusulkan untuk kurs rupiah sebesar Rp 10.500. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, fraksi ini mengusulkan sebesar 6,1 persen. (sf), foto : od/parle/hr.

Realisasi Belanja Kemenpora Tidak Optimal

Komisi X DPR RI menilai realisasi belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2012 tidak optimal. Peralpnya, dari pagu APBN 2012 sejumlah Rp 1.768 triliun hanya terealisasi sebanyak Rp 954 miliar atau 53,99%.

“Komisi X menilai realisasi belanja Kemenpora tidak optimal. Karena itu, Komisi X mendesak Kemenpora untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar realisasi belanja tahun mendatang lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKP,” ujar Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto saat memimpin raker antara Komisi X dengan Menpora Roy Suryo, di Gedung Nusantara I, Kamis (29/08) sore.



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto.

Komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga ini juga menilai realisasi anggaran belanja Kemendikpora tahun 2013 belum optimal. Sampai 26 Agustus 2013, Kemendikpora baru merealisasikan anggaran sebesar Rp 487 miliar, atau 25,82% dari pagu APBN 2013 sebesar Rp 1.886 triliun.

“Komisi X meminta Menpora untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan APBN 2013

berdasarkan jenis belanja, program, dan kegiatan,” tambah politisi PDI Perjuangan itu.

Selain itu, Komisi X mendesak Kemendikpora mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan penyerapan realisasi anggaran Kemendikpora tahun anggaran 2013 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sf), foto : wy/parle/hr.

Audit Hambalang Tidak Sebut Nama Atau Inisial

Laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang audit Hambalang tidak menyebut nama atau inisial seseorang. Hal tersebut diungkapkan Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR Sumarjati Aryoso pada Parle, Jumat (30/8).

“Sejak Selasa (27/8) siang, tepatnya setelah rapat paripurna kami menerima laporan hasil pemeriksaan (audit) Hambalang. Sepertinya isinya berbeda dari yang beredar di masyarakat belakangan ini,”ungkap Sumarjati.

Ditambahkannya, perbedaan itu salah satunya dengan tidak adanya

nama atau daftar nama seseorang atau anggota DPR yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran dalam proyek Hambalang. Selain itu masih ada beberapa perbedaan lainnya yang belum bisa diungkapkan saat ini.

“Yang pasti setelah menerima hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ini, kami akan tindak lanjuti, kami telaah dan kami diskusikan bersama anggota BAKN lainnya, kemudian hasilnya akan kami serahkan kepada pimpinan DPR, baru kemudian kami



Ketua BAKN DPR Sumarjati Aryoso.

siarkan kepada media,” jelas anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini.

Sebagaimana diketahui sepekan ini di masyarakat beredar beberapa nama anggota Dewan yang diduga terkait kasus penyalahgunaan dana proyek Hambalang. Nama-nama tersebut konon berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Ayu), foto : iw/parle/hr.

Perlu Mengubah Regulasi Untuk Kurangi Desentralisasi

Perlunya mengubah aturan atau regulasi untuk mengurangi desentralisasi dalam penanggulangan masalah. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily dan Reyhan Iskandar dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kepala BNPB Syamsul Ma'arif, Senin (02/09).

Ace mengatakan bahwa selama ini penanganan atau penanggulangan bencana masih dilakukan secara sentralisasi atau menggantungkan pada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Pusat.

Hal tersebut diakui Ace karena adanya regulasi yang mengatur dimana BNPB daerah kewenangannya berada di bawah gubernur atau pemerintah daerah, yang anggarannya berasal dari APBD. Sehingga segala sesuatunya harus sesuai dengan anggaran daerah. Sementara tidak sedikit pemda yang belum memberikan anggaran khusus untuk



Anggota Komisi VIII DPR Reyhan Iskandar.

bencana. Akhirnya, ketika bencana datang, penanganan dan penanggulangan bencana diserahkan seutuhnya pada BNPB pusat.

“Oleh karena itu saya menilai perlu kajian ulang tentang manajemen dan administrasi BNPB agar desentralisasi ini tidak terus terjadi. Karena bagaimanapun juga penanggulangan bencana tidak bisa hanya berpusat pada BNPB pusat. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban dan tugas yang sama,” jelas Ace.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS, Reyhan Iskandar. Dimana dari pengalaman penanggulangan bencana di Aceh, ia menilai Pemerintah daerah Aceh kurang siap dalam menanganinya.

“Pengalaman di Aceh, Pemda memang kurang siap dalam menangani bencana. Selain itu APBD Aceh untuk bencana hanya 500 juta. Bagaimana mungkin penanganan bencana ini bisa dilakukan Pemda. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan koordinasi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini,” papar Reyhan. (Ayu), foto :rizka/parle/hr.

DPR Gelar Wayang Kulit Sambut HUT-68



Ketua DPR RI Marzuki Alie menyerahkan Tokoh Wayang Semar kepada Dalang Ki Anom Suroto.

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk merupakan rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun DPR RI Ke 68. Pementasan wayang yang digelar di lapangan sepak bola DPR Senayan, Jakarta Sabtu (31/8) malam mengambil lakon, “Semar Boyong” dengan dalang yang sangat dikenal masyarakat yaitu Ki Anom Suroto.

Dalam pagelaran wayang kulit ini hadir Ketua DPR Marzuki Alie didampingi isteri Ny. Asmawati, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, serta perwakilan duta besar negara sahabat diantaranya dari India, Pakistan, Amerika Serikat, Cina dan Jepang.

Dalam sambutannya saat membuka pagelaran, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, secara sosial wayang memiliki posisi istimewa, karena merupakan salah satu bentuk kesenian yang mampu membina suatu keterikatan intelektual dan emosional yang mendalam.

Salah satu alasan penyelenggaraan wayang lanjut Ketua DPR, adalah adanya hubungan antara pertunjukan wayang dan masyarakat dan tontonannya. Selain itu, wayang mam-

pu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pembentukan nilai-nilai yang kompleks dalam tatanan sosial serta ketatanegaraan. “ Cerita Semar Boyong merupakan kisah teladan yang mampu memberikan inspirasi untuk kembali bangkit dari keterpurukan dan bencana,” ungkapnya.

Perjalanan cerita Semar boyong bermula dari pralaya (kebinasaan, bencana) yang melanda mayapada (jagad raya). Negeri-negeri besar seperti Amarta, Hastinapura, dan Pancawati mengalami bencana karena ditinggalkan Semar. Oleh karenanya, ketiga negeri tersebut dapat mengubah pralaya menjadi zaman gilang gemilang jika bisa memboyong Semar.

Selanjutnya, negeri-negeri tersebut berlomba memboyong Semar, Hastinapura mengutus Sengkuni, Pancawati mengutus Lesmana dan Amarta menugasi Arjuna.

Semar bersedia diboyong kemana pun, asalkan mereka dapat menyerahkan Sekar Pudhak Tunjung Biru yang merupakan penjelmaan Batari Kanastren yaitu istri terkasih Semar.

Pertempuran tak terelakkan, Lesmana dan Arjuna bertarung sengit memperebutkan kembang tersebut. Lesmana mendapatkan Tunjung Biru dan Arjuna mendapatkan Sekar Pudhak.

Ketika Sekar Pudhak dan Tunjung Biru disatukan oleh Semar maka Kanastren kembali menjelma dan membawa mandat Dewata Agung, bahwa tiba saatnya Semar untuk mengikuti Pandawa. Mendengar hal tersebut akhirnya Arjuna segera mengajak Semar ke Amarta. Dengan kembalinya Semar ke negeri Amarta, negara menjadi aman dan tenteram.

Semar mengingatkan bahwa terjadinya bencana akibat Paranayaka negara sudah meninggalkan tata susila dan budi pekerti tidak lagi dipakai seperti Pancasila. Pancasila merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sudah dilupakan. (wy,mp) foto: wy/parle.

Khatibul Umam Wiranu Jadi Wakil Ketua Komisi II DPR

Pimpinan Komisi II DPR mengalami reposisi, Taufik Efendi digantikan oleh Khatibul Umam Wiranu dari Partai Demokrat, sementara Pimpinan lainnya tetap.

Berikut komposisi Pimpinan Komisi II DPR, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa, Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, Arief Wibowo, dan Khatibul Umam Wiranu.

“Sekarang lengkaplah kepemimpinan di Komisi II DPR, kita meminta Komisi II DPR segera menyelesaikan tugas konsultasi yang harus diselesaikan,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (2/9).

Menurutnya, Komisi II DPR harus segera menyelesaikan UU penting seperti RUU ASN, persoalan politik dalam negeri dan soal lain yg berkaitan dengan tugas Komisi II DPR. “Ini merupakan keragaman kepemimpinan dan mewakili keberagaman di Komisi II DPR, karena itu diharapkan tugas konstitusi bisa lancar,” katanya.

Khatibul Umam Wiranu lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis, 10 Februari 1966, dia dibesarkan di kalangan keluarga yang bisa dikatakan sebagai “NU tulen”. Sejak



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menetapkan Khatibul Umam Wiranu sebagai Pimpinan Komisi II yang baru.

kecil ia mengenyam pendidikan pesantren yang dilalui di dua pesantren yakni Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda Bumiayu Jateng (1982-1985).

Kemudian dilanjutkan di Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang Jateng (1985 – 1988). Tidak hanya itu, Khatibul juga aktif di organisasi milik NU. Dirinya pernah aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor). (si)/foto:iwan armanias/parle.

Ketua DPR Terima Kunjungan Kehormatan Dubes China

Ketua DPR Marzuki Alie didampingi anggota DPR Albert Yaputra dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti menerima kunjungan kehormatan Dubes China untuk Indonesia Liu Jianchao di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (2/9).

Kunjungannya dimaksudkan untuk mempererat hubungan kedua negara termasuk parlemen China dengan DPR-RI. Dalam kesempatan ini juga dibicarakan mengenai rencana kunjungan Presiden baru Republik Rakyat China Xi Jinping yang akan berkunjung ke Indonesia, sebagai negara pertama yang dikunjungi pimpinan tertinggi rakyat China yang dilantik tanggal 15 Maret lalu.

Secara khusus, Dubes Liu Jianchao meminta ijin kepada Ketua DPR agar Presiden China dalam kunjungannya



Ketua DPR Marzuki Alie menerima kunjungan Dubes China untuk Indonesia Liu Jianchao.

ke Indonesia diberi kesempatan tampil berpidato di depan Sidang Paripurna DPR. “Selama ini belum pernah ada Presiden negara sahabat yang berpidato di depan Sidang Paripurna DPR. Kalau para anggota DPR tertarik, bisa diatur pada tanggal 3 Oktober mendatang,” ujar Dubes China yang mengenakan baju batik dalam pertemuan

tersebut.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPR Marzuki Alie menyambut baik kunjungan Presiden RRC ke Indonesia, sebagai wujud tekad ke dua negara untuk mewujudkan hubungan yang lebih harmonis. Sedangkan mengenai rencana tampil berpidato di depan

Sidang Paripurna, Marzuki Alie mengatakan belum ada ketentuan tata tertib yang mengatur pemimpin negara lain berpidato di Sidang Paripurna, apalagi tanggal 3 Oktober jatuh pada hari Kamis, sementara hari paripurna DPR ditetapkan pada hari Selasa.

“Karenanya usulan ini akan disampaikan ke Badan Musyawarah (Bamus DPR) untuk dibicarakan. Untuk masalah teknis selanjutnya, Kedubes

China bisa berkonsultasi dengan Sekjen DPR,” ungkap Marzuki.

Kepada Dubes Liu Jianchao, Ketua DPR mengharapkan dalam hubungan ekonomi kedua negara, Indonesia mengalami defisit yang cukup besar. Pemerintah China diharapkan memberi perhatian masalah ini agar tercapai keseimbangan sehingga saling menguntungkan.

Di bidang olah raga Ketua DPR mengharapkan kepada pemerintah China untuk membantu meningkatkan prestasi olah raga atlet-atlet Indonesia, khususnya cabang olah raga renang. Atas usulan ini Dubes China berjanji akan segera menghubungi Ketua Komite Olah Raga China sehingga atlet renang Indonesia bisa meningkatkan prestasinya mengikuti olah ragawan China yang sudah berprestasi tingkat dunia. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi I Pertanyakan Rencana TNI Laksanakan Pembangunan Jalan di Papua dan Papua Barat

Komisi I mempertanyakan penugasan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan pembangunan jalan pada ruas-ruas tertentu. Kementerian Pertahanan dan TNI mendapatkan anggaran dari BA(999) Bendahara Umum Negara untuk pembangunan jalan pada ruas jalan tertentu di Provinsi Papua dan Papua Barat, melalui Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) sebesar Rp 425 Miliar.

“Terkait anggaran maka diperlukan persetujuan dari DPR termasuk Komisi I, karena ada alokasi terkait Kementerian Pertahanan untuk pembangunan percepatan infrastruktur jalan di 2 provinsi tersebut,” papar Ketua Komisi Mahfudz Siddiq, saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di gedung DPR, Senin (2/09).

Patut diketahui dari data Kementerian Pertahanan, ada 14 lokasi sasaran kegiatan dengan rincian adalah pembangunan jalan Kasonaweja-Trimuris-Sarmi Rp 25M, Lagasari-Wapoga-Sumiangga Rp 35 M, Botawa-Wapoga Rp.20M, Windesi-Yaur-Kwatisore Rp 35 M, SP3 Gesa-Barapaso-Batas Waropen Rp 30M, Oksibil-Kawor-Waropko Rp 53M, Rosbori-Manggul-Poom (Lingkar Yapen) Rp 20M, Dawai, Waindu (Lingkar Yapen) Rp 20M, Saubeba-Rosbori (Lingkar Yapen) Rp 20 M, Kenyam-Gearek Rp 40M, Gearek-Pasir Putih-Suru Suru Rp 40M, Suru Suru-Obio-Dekai Rp 40M, Mumugu-Batas Batu Rp 30M, Jalan Lingkar Marsinam Rp 17M.

Anggota Komisi I Mirwan Amir dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa biasanya penggunaan anggaran BA-999 ketika dalam keadaan sangat *urgent*. “Menggunakan dana ini misalnya saat terjadi bencana alam,” katanya.

Dia juga mempertanyakan terkait membuat jalan jalan itu sangat *urgent* sehingga harus dilakukan Menhan, yang biasanya pembangunan jalan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Apakah ini sangat *urgent* di Papua, apakah Kementerian PU tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pelaksanaan jalan ini,” tanya Mirwan.

Tri Tamtomo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan apakah ada kesulitan yang dihadapi yaitu keamanan di titik-titik tertentu sehingga ber-

pengaruh kepada satuan yang terlibat, medan yang sulit, pemindahan manusia, pemindahan alat, dan pemindahan bahan bakar lewat jembatan udara.

Di Papua ada 3 detasemen sipur, sedangkan karya jalan yang dibuat dengan kewilayahan belum dicapai target yang diharapkan. Padahal untuk pemindahan alat dan manusia bisa mencapai minimal 3 bulan. “Sekarang tinggal berapa bulan, ini berbahaya,” katanya.



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan.

Muhammad Oheo Sinapoy dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan kekhawatirannya bahwa akan terjadi proses pelanggaran konstitusi kalau ini tetap terus dijalankan. Pertama perencanaan keuangan dalam UU No 17 tahun 2003 Pasal 1 harus direncanakan didalam keuangan tahunan.

“Tidak boleh dipertengahan jalan muncul ide itu, tidak boleh diakhir muncul ide itu atau tidak boleh tiba-tiba muncul,” jelasnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa hal ini dilakukan karena ada Peraturan Presiden tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, mengamanatkan Pemerintah memberikan penugasan kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu yang merupakan bagian dari jalan P4B. Pembangunan jalan tertentu meliputi kegiatan peren-

canaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan dilakukan secara swakelola.

Pendanaan yang diperlukan bagi pembangunan jalan P4B dibebankan pada APBN, untuk pendanaan pembangunan ruas-ruas jalan tertentu dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertahanan. Karena Penanggung Jawab Anggaran (PA) adalah Kementerian Pertahanan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TNI

Angkatan Darat. “Kalau nanti dilaksanakan akan melibatkan Batalion Zeni Tempur,” tegas Purnomo.

Terkait tindak lanjut, hal tersebut Komisi I dan Kementerian Pertahanan sepakat untuk melakukan pembahasan lanjut secara teknis dengan pihak-pihak terkait yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, Direktur Zeni AD, Komandan Korps Marinir, UP4B. (as), foto : ry/parle/hr.

Komisi XI DPR Terima Pengaduan Nasabah PT GBI

Suasana di lobi Ruang Rapat Komisi XI mendadak ramai. Tak kurang dari 200 orang berkumpul di situ. Ada apa gerangan? Rupanya orang-orang ini adalah perwakilan dari 2.500 nasabah PT Gold Bullion Indonesia (GBI).

Mereka hendak melaporkan tindakan penipuan yang dilakukan oleh PT GBI. Perusahaan yang bergerak di investasi emas tersebut membawa kabur uang nasabahnya sekitar Rp 1,2 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menyatakan bahwa pihaknya akan membantu para nasabah ini untuk kembali mendapatkan haknya. Komisinya akan mencoba mengundang pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini.

“Selasa depan (10/09), kami akan coba mengundang Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kapolri, BKPM, MUI, juga termasuk Direksi PT GBI. Untuk itu kami minta data-data lengkap dari nasabah, termasuk list nama bank yang terlibat di dalamnya,” jelas Harry di Gedung Nusantara I, Senin (2/09) sore.

Ketika dialog berlangsung, mendadak suasana menjadi ricuh. Pasalnya, salah satu nasabah GBI yang sedang menyampaikan keluhannya, disambut dukungan nasabah GBI lainnya yang malah menimbulkan keributan. Hal itu pun memicu emosi Harry, sampai dirinya menggebrak meja.



Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menerima perwakilan 2.500 nasabah PT Gold Bullion Indonesia (GBI).

“Saya juga bisa emosi, saya bisa pukul meja. Tolong yang tertib. Saya akan bela habis-habisan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Tapi, kalau bapak dan ibu-ibu tandatangan terhadap sesuatu yang tidak dimengerti, itu ada kesalahan juga dari bapak ibu sekalian,” tegas Politisi Golkar ini.

Dalam penjelasannya, para nasabah mengaku mereka percaya terhadap GBI karena mendapat sertifikat halal dari MUI dan perbankan syariah. Sebelumnya, para perwakilan nasabah yang terkumpul dalam Perjuangan Nasabah GBI telah mengirim surat aduan ke berbagai lembaga OJK dan BI, namun belum mendapat tanggapan yang positif. (sf), foto : od/parle/hr.

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2012

Sembilan Fraksi di DPR telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012 untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan ini menjadi agenda tunggal dalam

Rapat Paripurna hari ini, Selasa (3/09), di Gedung Nusantara II.

Sebelum Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengetuk palu keputusan, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Yasonna H Laoly memaparkan Laporan

Hasil Pembicaraan Tingkat I di Banggar.

Dalam paparannya, Yasonna menyatakan bahwa pemerintah sudah menyampaikan Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2012 dari Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Yasonna H Laoly.

Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012 pada 9 Juli 2013. Kemudian, seluruh fraksi di DPR menyampaikan pandangan atas RUU tersebut, dan pada 20 Agustus, Pemerintah kembali menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi itu.

“Pada kesempatan ini, kami sampaikan juga pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi-fraksi dalam rapat kerja di Banggar,” ujar Yasonna ketika memaparkan laporan di hadapan anggota Dewan.

Terkait dengan pendapatan negara, papar Yasonna, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk terus melanjutkan program reformasi

di bidang perpajakan yang mencakup program reformasi di bidang administrasi, di bidang perundang-undangan, di bidang pengawasan dan penggalan potensi.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar berharap agar pengelolaan negara ke depan dapat lebih ditingkatkan kualitasnya agar amanah konstitusi terkait pengelolaan keuangan negara dapat dipenuhi.

“Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, perlu adanya konsep yang jelas tentang *reward/punishment* sebagai

wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. PDI Perjuangan mendesak Pemerintah untuk lebih meningkatkan upaya penciptaan tertib dan disiplin anggaran,” imbuh Yasonna.

Hal senada diungkapkan Fraksi PKB yang meminta agar Pemerintah terus melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai.

Sementara itu, Fraksi PPP menyoroti pentingnya fungsi perencanaan

anggaran karena diharapkan dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.

Sedangkan, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas kemajuan opini LKPP Tahun 2013, namun mendesak pemerintah tidak hanya berhenti pada proses kualitas opini namun dapat dilihat dari indikator keberhasilan atas pelaksanaan APBN tersebut.

“Fraksi PAN belum melihat adanya keseriusan dari Pemerintah untuk membuat program antar K/L yang terintegrasi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja,” papar Politisi PAN ini.

Pandangan mini berikutnya, Fraksi Partai Gerindra meminta guna mewujudkan postur APBN yang ideal di tahun-tahun berikutnya, maka secara bertahap perlu dilakukan upaya untuk mengurangi belanja rutin untuk selanjutnya dialihkan ke dana infrastruktur, pendidikan, pertanian dan kesehatan, serta meninjau kembali kebijakan defisit mengingat hampir selalu diiringi dengan pengambilan utang baru.

Fraksi Partai Hanura berpandangan bahwa Pemerintah kurang serius dalam menanggapi dan menindaklanjuti hasil temuan BPK, karena tercermin dari berulangnya beberapa kasus yang terjadi di tahun sebelumnya terulang di tahun 2012. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

UMKM Harus Diberi Penguatan

Seiring melemahnya nilai tukar rupiah, sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) terkena imbasnya. Perlu ada penguatan segera terhadap para pelaku UMKM ini. Kementerian BUMN rencananya akan membeli saham-saham UMKM tersebut, agar bisa tetap beroperasi.

Anggota Komisi VI DPR Ida Ria Simamora menjelaskan hal tersebut sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (3/9). “Ini tugas pemerintah kita untuk menaikkan nilai rupiah terhadap dolar. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah dan salah satu yang dilakukan saat ini adalah beberapa



Anggota Komisi VI DPR Ida Ria Simamora.

BUMN kita akan membeli saham-sahamnya. *Buy back* BUMN,” ungkap Anggota F-PD itu.

Masih menurut Ida, neraca perdagangan kita juga harus lebih baik agar ekspor kita bisa ikut membaik. Dengan begitu, terjadi surplus dan tidak melulu mengalami defisit. Perbaikan di sektor makro berdampak pada perbaikan di tingkat mikro. “Usaha kecil menengah kita harus diberikan penguatan, karena tingkat suku bunga sekarang juga naik. BI Rate juga naik. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah.”

Ida mengungkapkan, dalam raker

dengan Menkop nanti, akan difokuskan pembicaraan soal ini. Sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk menyetujui sektor UMKM tersebut. Pelaku usaha kecil menengah, lanjut Ida, masih melihat kondisi perekonomian

terakhir ini dengan bijak. Mereka tetap bisa membangun usaha kecilnya dengan baik.

“Memang di lapangan harga-harga bahan baku dan pokok naik. Tapi,

paling tidak pemerintah tetap memberikan perhatian, kemudian modal usaha juga akan disalurkan melalui perbankan plat merah kita,” ucap Ida. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

Komisi III Kritisi Kebijakan yang Penting Tangkap dan Tahan Dulu



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta aparat penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan menggunakan kewenangan menangkap dan menahan tersangka sesuai koridor hukum yang benar. Ia mengaku prihatin menyikapi kondisi rumah tahanan di banyak daerah di tanah air saat ini sudah melebihi kapasitas.

“Kepolisian dan kejaksaan sering menggunakan kewe-

ngangan tangkap dan tahan saja dulu, salah-gak salah nanti kita lihat di pengadilan, itu sebabnya rutan sering terlihat penuh. Pihak kepolisian bisa membantu negara dalam mengurangi *overload* rutan dan lapas,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/13).

Sementara itu, anggota Komisi III dari FPKS Adang Darajatun mengingatkan agar Polri mempersiapkan sejak dini termasuk pengajuan anggaran untuk pengamanan Pemilu 2014. “Kami minta persiapannya dijelaskan termasuk alokasi anggaran karena pengamanan pemilu sangat penting,” ujar mantan Wakapolri ini.

Dalam penjelasannya Wakapolri Komjen Oegroseno memaparkan dalam RAPBN 2014 telah diajukan anggaran sebesar Rp 4,1 triliun untuk pengamanan pemilu. Angka itu menurutnya tidak jauh berbeda dengan anggaran Pemilu 2009 lalu.

“Jadi untuk anggaran pemilu ini harapannya minimal ya sama lah dengan tahun lalu,” ungkap Oegro yang baru saja dilantik awal bulan Agustus lalu.

Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan keamanan ini mengawali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 dengan membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L). Disamping Wakapolri turut hadir dalam RDP Pimpinan KPK Zulkarnain, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM dan Jambin Kejaksaan RI. (iky)/foto:rizka/parle/iw.

Komisi V DPR Pertanyakan Program Infrastruktur Pedesaan Yang Lamban

Anggota Komisi V DPR Ibnu Munzir (F-PKB) mempertanyakan program infrastruktur pedesaan yang lamban. Pasalnya DPR telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 9 Triliun untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

“Saat ini ekonomi mengalami turbulensi karena itu peran mitra kerja Komisi V DPR sangat diharapkan, karena kita tidak dapat mengharapkan dari sektor pertanian yang mengalami inflasi, dikarenakan memang salah satunya infrastruktur yang rusak,” terang-



Anggota Komisi V DPR Ibnu Munzir.



Anggota Komisi V DPR Riswan Tony.

nya saat Raker Komisi V DPR dengan Menteri PDT Helmy Faisal, Menteri PU

Djoko Kirmanto, Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama, Gedung Nusantara, Selasa, (3/9).

Menurutnya, subsidi harus diberikan dalam bentuk program infrastruktur pedesaan secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan.

Sementara Riswan Tony (F-PG) mempertanyakan manajemen pengelolaan anggaran di Pekerjaan Umum, dirinya melihat bahwa kontrak PU kerap membawa misi dari Satker saja tidak

membawa kepentingan program yang sifatnya strategis atau unggulan.

“Kita tidak melihat program yang besar dan sukses yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, harusnya makin besar dana yang dikelola dan pusat memegang wewenang kendali untuk mengalokasikan program,” ujarnya.

Dia mengharapkan Pekerjaan Umum dan timnya mampu membuat program yang sukses dan menambah kapasitas jalan di Indonesia. (si)/foto:wahyu/parle/iv.

Komisi VIII Desak Lunasi Segera Hutang Gaji Guru Agama

Komisi VIII mendesak Kementerian Agama untuk melunasi tunggakan hutang kepada guru agama baik PNS dan Non PNS. Bahkan Komisi VIII juga memberikan target pada Kementerian Agama untuk melunasi atau paling tidak membayar setengah tunggakan hutang gaji guru tersebut pada tahun ini, sehingga tahun 2014 permasalahan tersebut sudah selesai.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII, Hidayat Nurwahid, Selasa (3/9), sesaat setelah rapat paripurna DPR RI. Dikatakan politisi dari Fraksi PKS ini, tunggakan gaji guru di lingkungan Kementerian Agama belum terbayar sejak tahun 2009. Dengan total tunggakan sebesar Rp 2,3 triliun.

“Ini masalah serius, dan sudah seringkali kami rapat dengan Kementerian Agama untuk melunasi tunggakan

hutang gaji guru agama tersebut, namun sampai saat ini belum juga dibayarkan,” ungkap Hidayat.

Oleh karena itu, Komisi VIII saat rapat kerja dengan Menteri Agama, Senin (2/9) kemarin meminta komitmen Menteri Agama untuk menyelesaikan masalah ini.

“Masa negara hutang dengan guru. Sudah hampir lima tahun tidak selesai-selesai lagi. Ini kan sangat menyedihkan. Untuk itu kami akan melakukan pembahasan yang lebih intensif lagi dengan para pejabat eselon I di Kementerian Agama,” jelas Hidayat.

Salah satu cara yang ditawarkan Komisi VIII adalah dengan menyalurkan program-program di Kementerian Agama, mana yang *urgent* dan mana yang tidak. Dijelaskan Hidayat misalnya program pembangunan seribu madrasah, karena memang tidak terlalu *urgent* maka madrasah yang dibangun bisa 500 saja. Sementara sisa dananya bisa digunakan untuk mencicil pembayaran tunggakan atau hutang gaji guru agama.

Selain itu Hidayat menambahkan, beasiswa bagi siswa miskin yang sifatnya tidak terlalu mendesak, hal tersebut bisa dilakukan di kemudian hari setelah kewajiban utama Kementerian Agama yaitu membayar hutang-hutang terselesaikan.

“Membayar hutang adalah wajib hukumnya, oleh karena itu dahulukanlah yang wajib. Dan Alhamdulillah bapak Menteri Agama menyetujui hal itu, beliau berkomitmen untuk melunasi tunggakan gaji guru itu dengan segera, agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut,” ujar Hidayat mengakhiri.

Seperti diketahui Pagu sementara anggaran Kementerian Agama meningkat dari sebelumnya Rp 49,276 triliun menjadi Rp 49,582 triliun. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.



Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nurwahid.

Calon DGS Bank Indonesia Harus Fokus Makro Prudensial

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta menyatakan bahwa calon Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia harus fokus pada kebijakan makro prudensial. Pasalnya, per 1 Januari 2014, fungsi pengawasan perbankan (mikro prudensial) akan berpindah dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Anggota Komisi XI DPR Muhammad Hatta.

“Calon DGS baru ini akan menghadapi fase baru pada BI, dan akan fokus pada makro prudensial. Walaupun, pemahaman mikro tetap kita butuhkan untuk pengawasan likuiditas BI. DGS ini harus orang yang *prudent*, dan banyak faktor lain yang tetap harus diperhatikan agar sesuai dengan yang kita harapkan,” jelas Hatta usai *fit and proper test* di ruang Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/09) sore.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang.

Hal senada diucapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang. “Sesungguhnya fungsi Bank Indonesia itu lebih ke fungsi makro. Oleh karena itu, dibutuhkan kandidat yang paham ekonomi makro,” imbuh Andi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi XI melakukan *fit and proper test* kepada dua calon DGS yang telah diusulkan Presiden. Kedua calon tersebut adalah Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara. Calon lainnya adalah Anton Gunawan yang kini menjabat Kepala Ekonom Bank Danamon.

Saat uji kepatutan dan kelayakan, Mirza membawakan materi tentang Reposisi Peran Bank Indonesia: Nilai Rupiah, Pertumbuhan, dan Stabilitas. Sementara itu, Anton menyampaikan paparan, Meningkatkan Kredibilitas dan Efektifitas Kebijakan Bank Indonesia.

Beberapa anggota menguji calon DGS terkait dengan fungsi BI, sektor moneter, inflasi, hingga krisis global. (sf)/
foto:odjie/parle/iw.

Komisi IV Setujui RAPBN Kementerian Kehutanan Tahun 2014

Komisi IV DPR RI mengharapkan program yang diusulkan dalam Tahun Anggaran (TA) 2014 oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dapat mencapai sasaran target kinerja. “Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2014 Kemenhut sebesar Rp 5,262 Triliun,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun 2014 dan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), di gedung DPR RI, Selasa (3/09).

Firman mengungkapkan bahwa Komisi IV telah menyetujui usulan Kementerian Kehutanan untuk inisiatif

baru sebesar Rp 1,229 Triliun, namun hanya sebesar Rp 200 Miliar yang disetujui Kementerian Keuangan. “Untuk mencapai sasaran target tahun 2014, masih diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,029 Triliun,” paparnya saat memimpin raker.

Selanjutnya, Komisi IV meminta anggaran DAK digunakan sesuai dengan kriteria teknis yang disepakati bersa-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo berjabat tangan dengan Menteri Kehutanan sebelum Raker dimulai.

ma. “Komisi IV menerima usulan DAK Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2014 sebesar Rp 2,582 Triliun,” tegas Firman.

Sasaran rencana kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan antara lain tata batas kawasan hutan sepanjang 20.000 Kilometer, Areal tanaman pada hutan tanaman (HTI, HTR) bertambah seluas 550.000 Hektar, Peningkatan populasi spesies

prioritas utama, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu 3 DAS, serta Rehabilitasi Hutan dan lahan seluas 500.000 Ha.

Arah Kebijakan DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk peningkatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Peningkatan daya dukung DAS, perlindungan hutan dan kawasan esensial, serta pemberdayaan masyarakat.

“Terehabilitasinya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 69.000 Ha,” kata Zulkifli Hasan.

Selain itu, Menteri Kehutanan juga menyampaikan perlu sebesar Rp 75 Miliar untuk pengadaan 3 unit Helikopter, dalam rangka perlindungan hutan melalui Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan. (as)/foto:wahyu/parle/iv.

Komisi VII DPR Berencana Undang KKKS Terkait Lifting Migas

Komisi VII DPR berencana akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) SKK Migas untuk meminta penjelasannya terkait target *lifting* migas yang belum optimal.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik dipimpin oleh Ketua



Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani Hilman.

Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, di Gedung Nusantara I, Rabu sore, (4/9).

Dewi Aryani Hilman dari Fraksi PDIP mengatakan, perlu kejelasan indikator KKKS mengapa target *lifting* bisa turun. “Kita sangat sayangkan Chevron dengan infrastruktur sedemikian bagus mengapa turun *liftingnya*,” ujarnya.

Dewi mengharapkan angka yang terukur dan rasional dari target *lifting* ini. artinya jangan sampai angka *lifting* tidak sama dengan yang diprediksi.

“Kita menginginkan di masa sisa Menteri ESDM Jero Wacik dapat membenahi tata kelola Migas, dan kita juga akan meminta penjelasan KKKS terkait

migas ini,” ujarnya.

Menurut Saifudin Donodjoyo dari Fraksi Gerindra, jika memungkinkan kita akan menghadirkan KKKS guna mengetahui *lifting* migas secara *real*. “Ini kita harapkan jangan sampai ada manipulasi diantara kita,” katanya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IX Dukung Usulan Reward Bagi BKKBN

Komisi IX DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2012 yang telah mendapat hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Oleh karena itu, Komisi IX mendukung usulan pemberian *reward* kepada BKKBN berupa penambahan remunerasi.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno.

Hal tersebut merupakan keputusan rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Kepala BKKBN, Fasli Jalal dengan agenda Laporan Keuangan Tahun 2012 BKKBN, RKA K/L Tahun 2014 dan Program/Kegiatan Prioritas BKKBN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9)

“Terkait usulan Pagu Sementara BKKBN Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 2.888.448.074.000,- akan dibahas lebih rinci dan mendalam oleh Komisi IX bersama para eselon I BKKBN,” kata Wakil Ketua Komisi IX, Soepriyatno yang memimpin rapat tersebut.

Selain itu, Komisi IX juga menyetujui Anggaran Direktif Presiden (BA 999) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 15.000.000.000,- untuk Program Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN, Fasli Jalal dalam penjelasannya menyampaikan, bahwa anggaran untuk Pembangunan Kependudukan Tahun 2012 secara nasional semula sebesar Rp 2.593.734.243.000,-

Pada Agustus 2012 terdapat pengurangan atau efisiensi sebesar Rp 483.624.365.000,-, dan penambahan *reward* sebesar Rp 11.129.056.000. Sehingga anggaran BKKBN menjadi Rp 2.121.238.934.000.

Sementara untuk realisasi anggaran BKKBN, dari pagu anggaran DIPA BKKBN secara nasional sebesar Rp 2.272.536.381.000,- sampai dengan Desember 2012 realisasi SPM 97,46% atau sebesar Rp 2.214.922.150.000,-

Sedangkan anggaran Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2014, berdasarkan pertemuan Tiga Pihak atau *Trilateral Meeting* pada 11 April 2013, maka pagu indikatif disepakati sebesar Rp 2,679 triliun.

“Untuk itu BKKBN telah berupaya untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kegiatan-kegiatan prioritas guna mendukung upaya pencapaian sasaran Rencana Kerja BKKBN Tahun Anggaran 2014 dan direktif Presiden untuk RKP 2014,” ujar Fasli. (sc/iff/cs)/foto:odjie/parle/iw.



Kepala BKKBN Fasli Jalal.

Serangan Militer AS Atas Suriah Ceroboh dan Ilegal

Amerika sedang mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan terhadap pemerintahan Suriah yang sejak Maret 2011 lalu terus bergejolak. Amerika bersikeras bahwa intervensi militer adalah pilihan yang paling memungkinkan untuk mencegah memburuknya perang sipil yang telah merenggut ratusan ribu korban jiwa. Intervensi militer ini juga dimaksudkan untuk menghukum Pemerintahan Presiden Bashar Assad atas tuduhan penggunaan senjata kimia pada penyerangan tanggal 21 Agustus lalu.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso kepada pers, Rabu (4/9) mengatakan, serangan militer atas Suriah adalah ilegal dan ceroboh. “Saya pikir pengalaman penyerangan atas Irak tahun 2003 seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi AS untuk tidak melakukan intervensi militer dengan alasan yang secara hukum internasional tidak bisa dibuktikan. Jika kita berkaca kepada Irak, apakah dalam 10 tahun terakhir ini AS mampu membuktikan keberadaan senjata pemusnah massal di Irak?” tanya Priyo.

Namun Priyo juga mengecam apa yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Bashar Assad. “Meskipun saya tidak menyetujui intervensi militer di Suriah, tapi bukan berarti saya mendukung tindakan semena-mena Suriah terhadap warganya. Dialog seharusnya menjadi titian ikhtiar yang tidak boleh lepas dari genggamannya manakala kekerasan ada di depan mata. Saya percaya bahwa perdamaian dan dialog bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah dan warga Suriah,” ungkap politisi senior Golkar ini.

Selanjutnya Priyo menyebutkan bahwa dunia sudah letih dengan begitu banyaknya konflik yang sedang terjadi dan belum memunculkan tanda-tanda penyelesaian. “Dunia masih menanggung dampak penyerangan AS terhadap Afghanistan dan Irak. Letih itu belum terobati dan sekarang ada rencana menambah beban tersebut,” katanya.

Sebagai Ketua Kaukus DPR RI untuk Amerika Serikat, Priyo sebenarnya mencoba memahami rencana AS tersebut. “Saya berpikir keras mencoba untuk menyelami apa yang ada di benak Presiden Obama saat ini. Saya mengerti bahwa serangan ditujukan untuk meredam rezim otoriter di Suriah. Tapi, apakah intervensi militer akan membuat kondisi Suriah lebih baik? Setidaknya lebih baik dari apa yang terjadi di Afghanistan dan Irak?” Kemudian, politisi berkacamata ini kembali mempertanyakan keabsahan rencana serangan tersebut. “Tuduhan ini harus dibuktikan. PBB telah turun tangan dengan mengirim investigasinya. Nah, biarkan PBB mengambil keputusan secara kolektif atas hasil-hasil temuannya di Suriah yang sesuai dengan hukum internasional utamanya Konvensi Jenewa,” tegas Priyo.

“Kita harus ingat bahwa saat ini sepertiga populasi atau sekitar 7 juta warga Suriah telah menjadi pengungsi akibat perang sipil ini. Apakah intervensi militer akan mengurangi jumlah tersebut atau malah membuat jumlah pengungsi ini membengkak?” tegas Priyo. “Saya ber-husnudzon saja bahwa Presiden Obama, sebagai penerima Nobel perdamaian dunia akan memikirkan ulang rencana tersebut. Saya pun berharap Kongres AS juga akan berfikir jernih untuk menolak rencana ini seperti yang telah dilakukan oleh para Anggota Parlemen Inggris beberapa waktu lalu terhadap usul pemerintah mereka.” demikian Priyo. (*mp) foto: Iwan Armanias/parle.



Ketua DPR Marzuki Alie didampingi ibu Asmawati, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyaksikan Pagelaran Wayang Kulit dengan dalang Ki Anom Suroto, Sabtu (31/08), foto: Wahyu/Parle.



Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua DPR/Korinbang Pramono Anung menerima Delegasi Center For Election and Political Party (CEPP) FISIP-UI di Gedung Nusantara III, Selasa (03/09), foto: Iwan Armanias/Parle.



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana memimpin Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Jero Wacik membahas masalah penetapan asumsi dasar ICP, Lifting minyak, LPG bersubsidi di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (04/09), foto: Iwan Armanias/Parle.